

**KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

**SUB KATEGORI**

Kependudukan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah adalah banyaknya penduduk yang sudah menetap disuatu daerah tertentu dan belum memiliki akta otentik tentang pencacatan peristiwa perkawinan yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.
- Penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- Akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan
- Buku nikah adalah kutipan akta nikah.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

**RUMUS**

Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah = Jumlah Penduduk Total - Jumlah Penduduk memiliki akta nikah

---

Teknik penghitungan

1. Menentukan jumlah penduduk se-Kabupaten
2. Menentukan jumlah penduduk memiliki akta nikah

**WALI DATA**

Kantor Kementerian Agama

**UKURAN**

Jiwa

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah penduduk yang belum memiliki akta nikah.

**INTERPRETASI**

Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah menunjukkan banyaknya penduduk yang sudah menetap disuatu daerah tertentu dan belum memiliki akta otentik tentang

pencacatan peristiwa perkawinan yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.

## **KETERANGAN**

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 26

- 1) PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.
- 2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.
- 3) Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.
- 4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah

Pasal 27

- 1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.
- 2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan

## **SUMBER**

KUA

## **METODOLOGI**

1. Melakukan supervisi /monitoring NR setiap triwulan dalam setiap tahun.
2. Meminta laporan data nikah kepada Kepala KUA

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Bulanan

## **LAG DATA**

H

## **KEWENANGAN**

Kemenag RI

## **DOKUMEN**

SIPD

